

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilaksanakan sejak tahun 2000 dengan landasan UU 22/2009 dan UU 25/2005. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang meliputi propinsi, kabupaten/kota dimana pemerintahannya adalah pemerintahan propinsi, pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati/walikota dan masyarakat daerah sebagai unsur

2. Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001).

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2004) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah

3. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
4. Halim (2001) mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu :
 1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah.
 2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
 3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Total aset adalah keseluruhan dari sumber ekonomi yang diharapkan akan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset yang dimaksudkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Ukuran dari suatu daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian intern dalam suatu daerah. Semakin besar ukuran daerah, maka kelemahan pengendalian intern akan berkurang.

4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang-bidang ekonomi. Supriana (2008) peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa- jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun -tahun sebelumnya.

Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi).
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional.
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999).

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, beberapa dihasilkan dari penggabungan dua jenis model yaitu model dan

tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna. Ada dua hal utama yang dibahas dalam model ini, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi pada saat pertumbuhan persediaan (*stock*) modal lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi tanpa perubahan teknologi, akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja, meningkatkan marginal produk tenaga kerja serta meningkatkan upah. Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian modal (*return of capital*) dan menurunkan tingkat suku bunga riil.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern dalam suatu daerah. Semakin besar pertumbuhan ekonomi daerah, maka akan semakin baik pengendalian internnya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin besar akan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sehingga semakin besar pertumbuhan ekonomi akan semakin baik kelemahan pengendalian intern daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita Dewi, dalam Maemunah 2006 yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah (Kesit Bambang, 2003). Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 6) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang, 2003). mendasar balas jasa langsung. Retribusi

c. Retribusi perizinan tertentu

3. Penerimaan Daerah

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten/Kota adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota di luar pajak, retribusi, bagian lab BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana perimbangan terdiri dari (UU No.32 tahun 2004, pasal 159):

a. Dana Bagi Hasil

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dan Sumber Alam.

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian intern daerah. Semakin besar pendapatan asli suatu daerah akan semakin baik pengendalian internnya. Jadi, pendapatan asli daerah yang semakin besar akan

.....

6. Jumlah Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kotamadya yang terdiri atas Desa dan Kelurahan. Dalam hal Otonomi Daerah, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

Jumlah kecamatan pada setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda. Semakin banyak jumlah kecamatan pada suatu daerah akan semakin baik juga pengendalian internnya. Sehingga jumlah kecamatan merupakan faktor yang memperkecil kemungkinan terjadinya kelemahan terhadap pengendalian intern.

7. Jumlah Penduduk

Menurut Konsep penduduk menurut BPS, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Menurut Jonny Purba, Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam

Jumlah penduduk yang setiap saat dapat berubah dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern daerah. Jumlah penduduk yang semakin banyak maka akan semakin baik juga pengendalian intern.

8. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011)

Sistem pengendalian internal (SPI) adalah perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu sistem pengendalian yang terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan Negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Dalam penelitian ini, sistem pengendalian intern dilihat dari kelemahan pengendalian intern pada pemerintahan daerah. Kelemahan pengendalian intern pada penelitian ini berdasarkan audit BPK.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang faktor determinan pengendalian intern banyak dilakukan di sektor swasta dan organisasi nirlaba. Penelitian tersebut yaitu Ge dan McVay (2005), Doyle, Ge, dan McVay (2007), Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007), Zhang, Niu, dan Zheng (2009), dan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010).

Ge dan McVay (2005) melakukan penelitian untuk melihat pengungkapan kelemahan material pengendalian intern setelah diterapkannya

Salman, Olan, dan Penelitian ini menggunakan sampel 261 perusahaan yang

mengungkapkan minimal satu kelemahan material pengendalian intern dalam lembar isian SEC (*security and exchange commission*) setelah tanggal efektif dari *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002. Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010). Berdasarkan deskripsi yang diberikan manajemen ditemukan bahwa pengendalian intern yang lemah biasanya berhubungan dengan komitmen yang kurang dalam pengendalian akuntansi. Kelemahan material pengendalian intern cenderung pula untuk berhubungan dengan kebijakan pengakuan pendapatan yang lemah, kurangnya pemisahan tanggung jawab, kekuarangan dalam proses pelaporan akhir periode dan kebijakan akuntansi, dan rekonsiliasi akun yang tidak tepat. Secara spesifik kelemahan pengendalian intern paling sering terjadi pada *current accrual account* seperti piutang dan persediaan. Selain itu kelemahan juga sering terjadi pada akun yang kompleks seperti transaksi *derivative* dan akun pajak penghasilan. Berdasarkan hasil analisis statistik peneliti menemukan bahwa kompleksitas (diukur dengan jumlah segmen operasi dan translasi mata uang asing) dan profitabilitas (dilihat dari rasio *return on assets* dan nilai *cash from operation*) berhubungan positif dengan kelemahan material pengendalian intern. Sedangkan ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai buku perusahaan dan kapitalisasi pasar berhubungan negatif dengan kelemahan pengendalian intern.

Kemudian penelitian yang dilakukan Doyle, Ge, dan McVay (2007) ingin memeriksa faktor determinan dari kelemahan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Peneliti menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan kelemahan pengendalian intern dalam pelaporan

data *merger* dan akuisisi, pertumbuhan, dan restrukturisasi memiliki pengaruh positif.

Di Asia penelitian sejenis dilakukan oleh Zhang, Niu, dan Zheng (2009). Banyak sekali perusahaan di China membangun sistem pengendalian intern yang dikenal dengan *Enterprise Internal Control Basic Standard* (EICBS). Peneliti menemukan bukti bahwa kualitas pengendalian intern berhubungan positif dengan ukuran perusahaan, kondisi keuangan, filosofi manajemen, budaya, dan audit intern. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan data total aset perusahaan. Kondisi keuangan diukurv menggunakan data *Return on Equity* dan *Leverage*. Sedangkan filosofi manajemen, budaya, dan audit intern diukur menggunakan *Likert five Scale*. Peneliti juga menemukan kualitas pengendalian intern berhubungan negatif dengan *control power* dari pemegang saham mayoritas dan tingkat desentralisasi. Dengan demikian semakin terdesentralisasi organisasi akan membuat kualitas pengendalian intern menurun sehingga banyak kelemahan yang terjadi.

Penelitian juga dilakukan pada sektor organisasi nirlaba. Penelitian yang dilakukan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) ini ingin melihat penyebab dan dampak dari defisiensi pengendalian intern pada sektor nirlaba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27.495 lembaga amal dari tahun 1999 sampai 2007. Dari hasil pengolahan data statistik didapatkan hasil bahwa masalah pengendalian intern pada organisasi nirlaba memiliki hubungan positif dengan kondisi keuangan lemah, sedang tumbuh, lebih

pembagian tanggung jawab sehingga lebih teratur. Organisasi yang besar juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan implementasi sistem pengendalian intern seperti melakukan training dan konsultasi sistem pengendalian intern.

Menurut Ge dan Mcvay (2005) yang melakukan penelitian untuk melihat pengungkapan kelemahan material pengendalian intern *Sarbanes-Oxley Act* diterapkan. Penelitian ini menggunakan sampel 261 perusahaan yang mengungkapkan minimal satu kelemahan material pengendalian intern dalam lembar isian SEC (*security and exchange commission*) setelah tanggal efektif dari *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002. Berdasarkan hasil analisis statistik peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai buku perusahaan dan kapalisitasi pasar berhubungan negatif dengan kelemahan pengendalian intern. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

2. Pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern.

Penelitian tingkat pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan positif dengan kelemahan pengendalian intern. Selanjutnya, Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba menyimpulkan bahwa organisasi yang sedang tumbuh memiliki

masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan prosedur yang baru. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi.

Penelitian lainnya adalah penelitian Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007). Berdasarkan SOX seksi 302 perusahaan wajib melakukan sertifikasi bahwa telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Seksi 404 mengharuskan laporan keuangan perusahaan publik dalam formulir 10-K dan 10-Q mengandung penilaian manajemen tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompleksitas organisasi (jumlah segmen usaha, penjualan dengan mata uang asing, dan jumlah persediaan) berpengaruh positif terhadap masalah pengendalian intern. Begitu juga untuk perubahan organisasi yang dilihat dari data *merger* dan akuisisi, pertumbuhan, dan restrukturisasi memiliki pengaruh positif. Berdasarkan rerangka penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis yaitu:

Hipotesis 2: tingkat pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah

memiliki pengaruh positif dengan kelemahan pengendalian

3. Pengaruh PAD dalam pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern.

Pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi, contohnya pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan demikian diperlukan sumber daya yang lebih untuk melakukan pengendalian terhadap jenis pendapatan ini. Dalam penelitian Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) kompleksitas diukur dari banyaknya jumlah sumber pendapatan. Hasilnya menunjukkan semakin banyak jumlah sumber pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kompleksitas akan dilihat dari jumlah PAD. Nilai setiap satu sumber PAD biasanya tidak terlalu besar sehingga jika nilai total PAD besar kemungkinan berasal dari jumlah sumber PAD yang banyak. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat diturunkan yaitu:

Hipotesis 3: jumlah PAD dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan kelemahan pengendalian intern

4. Pengaruh jumlah kecamatan dalam pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern.

Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan

memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern

dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Kesulitan juga akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi. Ge dan McVay (2005), Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007) dan Doyle, Ge, dan McVay (2007) menemukan hubungan positif antara jumlah segmen usaha atau cabang organisasi dengan kelemahan pengendalian intern. Dengan demikian semakin banyak segmen atau cabang organisasi kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak. Peneliti berusaha menggunakan pendekatan terhadap variabel kompleksitas dengan menggunakan jumlah kecamatan yang dimiliki pemerintah daerah. Kecamatan dalam pemerintah daerah diasosiasikan dengan jumlah segmen dalam perusahaan atau cabang dalam organisasi. Diduga banyak masalah yang timbul dari banyaknya jumlah kecamatan seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan laporan keuangan. Dari uraian tersebut hipotesis yang dapat diturunkan yaitu:

Hipotesis 4: jumlah kecamatan dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan kelemahan pengendalian intern

5. Pengaruh jumlah penduduk pemerintah daerah dengan pengendalian intern.

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Jumlah penduduk menjadi salah satu ukuran kompleksitas pemerintahan daerah dalam penelitian ini. Jumlah penduduk juga menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Logikanya semakin banyak jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian akan semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum. Hal ini akan menambah kompleksitas yang ada di pemerintah daerah sehingga diduga akan meningkatkan jumlah kelemahan pengendalian intern. Dari uraian tersebut hipotesis yang dapat diturunkan yaitu:

Hipotesis 5: Jumlah penduduk pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan kelemahan pengendalian intern

D. Model Penelitian

Varibel Independen

Variabel Dependen

